

BAB I

PENDAHULUAN

A. Alasan Pemilihan Judul

Ada beberapa alasan yang mendorong penulis tertarik untuk mengangkat Peran Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam Usaha Pencapaian Kemerdekaan Kosovo menjadi judul skripsi ini. Pertama, Peran PBB sangat penting dalam menyelesaikan berbagai permasalahan di dunia, karena PBB merupakan sebuah organisasi internasional yang memiliki pengaruh yang sangat luas terhadap negara-negara di dunia. Begitu juga halnya dengan kasus Kosovo, keinginan Kosovo untuk menyatakan kemerdekaan dari Serbia mendapat dukungan dari PBB dengan mengirimkan utusan khusus sekjen PBB Martti Ahtisaari dan melakukan pertemuan-pertemuan yang difasilitasi oleh PBB.

Kedua, bahwa PBB merupakan sebuah organisasi yang memiliki tujuan untuk menjaga keamanan dan perdamaian dunia, serta berusaha untuk meredam berbagai konflik yang terjadi dengan menugaskan Dewan Keamanan PBB untuk melakukan tindakan yang dianggap perlu dalam mengatasi permasalahan keamanan dunia. Untuk itu penulis tertarik mengetahui usaha-usaha apa yang telah dilakukan PBB dalam proses pencapaian kemerdekaan Kosovo. Mengingat PBB telah menduduki wilayah Kosovo sejak terjadinya konflik yang berkepanjangan.

Ketiga, Kosovo adalah wilayah provinsi Serbia yang berpenghuni 90 persen etnis muslim Albania yang ingin memperjuangkan kemerdekaan dan membebaskan diri dari tekanan Serbia yang telah terjadi dalam kurun waktu cukup lama. Perjuangan untuk memerdekakan diri adalah upaya untuk menegakkan syariat islam dan menentang hegemoni kekuasaan Serbia pasca runtuhnya Yugoslavia serta tragedi kemanusiaan yang dialami oleh umat muslim Kosovo.

B. Latar Belakang Masalah

Setiap negara memiliki kebebasan untuk menentukan nasib sendiri agar tidak berada dibawah kekuasaan negara lain. Tidak ada negara-negara didunia yang ingin berada dalam kekuasaan negara lainnya, karena hal tersebut menjadikan negara yang dijajah akan mengalami penindasan dan kesengsaraan yang berkepanjangan. Tidak dapat dipungkiri negara yang kuat akan mengeksploitasi kekayaan baik Sumber Daya Alam (SDA) maupun Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki negara tersebut tanpa mengindahkan kepentingan dan kesejahteraan masyarakatnya, hal ini telah terbukti hampir disetiap negara yang menjadi korban penjajahan.

Penguasaan terhadap negara lain tampaknya masih terjadi hingga saat ini, walaupun secara tidak langsung tetapi membuat sejumlah negara tergantung dan tidak bisa mandiri terutama negara-negara miskin. Di era globalisasi, saat batas-batas geografis dan teritorial tak lagi mampu menjadi benteng pertahanan yang kukuh dari kebudayaan dan pengaruh bangsa lain, ketidakberdayaan suatu bangsa akan

menempatkan bangsa tersebut menjadi bangsa yang terpinggirkan. Bangsa yang miskin sangat mudah dipermainkan, dieksploitasi dan disetir kehidupan ekonominya oleh bangsa-bangsa yang kaya.

Untuk itu, dalam mengatasi berbagai permasalahan di dunia diperlukan sebuah lembaga internasional yang diharapkan memiliki kebijakan-kebijakan yang adil terhadap distribusi kesejahteraan negara-negara anggotanya. Organisasi internasional mengalami pertumbuhan yang sangat pesat seiring dengan perkembangan transportasi dan komunikasi. Misalnya, organisasi yang sangat dikenal adalah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tumbuh dan berkembang menjadi organisasi internasional terbesar di dunia dan memiliki fungsi yang sangat kompleks. PBB tidak hanya menangani keamanan global, tetapi organisasi ini juga terlibat dalam berbagai kegiatan sosial, ekonomi, dan kemanusiaan yang sangat kurang mendapat perhatian. Untuk mengatasi berbagai permasalahan telah dibentuk badan-badan yang memiliki tugas masing-masing. Selain itu, PBB juga memiliki andil untuk menciptakan aturan bagi negara-negara yang bersengketa untuk menyelesaikannya dalam kerangka perundingan damai sebagaimana tercantum dalam artikel 2 piagam PBB.

Walaupun telah berdiri lembaga-lembaga Internasional seperti Perserikatan Bangsa – Bangsa (PBB) yang memiliki wewenang besar dalam penyelesaian berbagai konflik yang terjadi, namun tidak menjamin terciptanya penyelesaian masalah. Karena PBB bukan merupakan suatu sistem politik yang mampu bertindak sendiri

atau menguasai sistem internasional. Efektivitasnya ditentukan oleh kualitas politik dunia dan rasa kebersamaan aggotanya.¹

Organisasi yang beranggotakan seluruh negara didunia ini bertujuan untuk menjaga perdamaian dunia sebagaimana yang tertuang dalam Bab VI Piagam PBB tentang Pacific Settlement of Disputes (Ayat 33). Dan sesuai dengan tujuan PBB yang tercantum dalam artikel 1 piagam PBB.² Sehingga, peran PBB sangat diharapkan dalam penyelesaian konflik yang terjadi baik konflik antar etnis maupun konflik antar negara untuk menciftakan perdamaian. Begitu juga halnya ketika konflik antar etnis terjadi di Kosovo, PBB juga memberikan andil dengan mengeluarkan Resolusi DK PBB 1244 tahun 1999 bahwa Kosovo berada dibawah pengawasan PBB.

Pembicaraan mengenai status final Kosovo pertama kali dirintis pada tahun 2006 melalui negosiasi di bawah pimpinan khusus Sekjen PBB Martti Ahtisaari, negosiasi berlangsung alot karena masing-masing negara tetap pada pendirian masing-masing, yaitu keinginan Serbia mempertahankan Kosovo di dalam wilayah otonominya dan sebaliknya keinginan Kosovo untuk memisahkan diri dari Serbia. Pada tanggal 26 Maret 2007, kepada Dewan Keamanan PBB, Ahtisaari melaporkan bahwa perundingan mengalami kemacetan. Namun, dia menyampaikan draf penyelesaian status Kosovo yang mengusulkan agar Kosovo diberi kemerdekaan di

¹ Jones, Walter S, *Logika Hubungan Internasional*, Terjemahan Dr. Budiono Kusumohamidjojo, PT. Gramedia, Jakarta, 1993. Hal 402.

² Kusuma Atmaja, Mochtar, *Perdamaian Dunia dan Peranan PBB*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1987. Hal 89.

bawah supervisi sementara Uni Eropa dengan angkatan perang NATO dan polisi Eropa.

Upaya penyelesaian masalah Serbia-Kosovo selanjutnya dilakukan dengan mengadakan perundingan langsung antara Serbia dan Kosovo, yang berlangsung selama 120 hari yang difasilitasi Troika Contact Group (Amerika Serikat, Rusia, dan Uni Eropa). Hasil perundingan itu dilaporkan kepada Dewan Keamanan PBB pada 19 Desember 2007. Sejumlah negara mendesak agar status akhir Kosovo segera diputuskan seperti, AS, Inggris, dan Perancis. Sedangkan Rusia, China, Ghana, Kongo, Panama, dan Afrika Selatan menyarankan agar perundingan diteruskan. Namun, Amerika Serikat, Inggris, dan negara-negara Barat lain menolak. Perkembangan ini berujung pada deklarasi kemerdekaan Kosovo yang dideklarasikan pada tanggal 17 Februari 2008, kemerdekaan ini didukung Amerika Serikat dan beberapa negara Uni Eropa, tetapi ditolak antara lain oleh Rusia, China, dan beberapa negara Uni Eropa.

Kosovo merupakan salah satu provinsi di Selatan Serbia, selama menjadi bagian dari Serbia masyarakat Kosovo merasakan pembantaian missal (*genocide*) yang dilakukan Serbia di bawah pimpinan Slobodan Milosevic (1989-1999) telah menimbulkan kenangan pahit yang tidak terlupakan, tercatat ratusan ribu warga Kosovo yang mayoritas muslim terbunuh. Dari dua juta penduduk Kosovo, 90 persennya Muslim.³ Tidak hanya itu pemerintahan Serbia juga melakukan

³ hizbut-tahrir.or.id/2008/03/04/kosovo-belum-sepenuhnya-merdeka/ - 69k -, diunduh pada tanggal 20 Agustus 2008.

pembersihan etnis (*ethnic cleansing*) terhadap etnis Albania yang menyebabkan terjadi konflik etnis antara etnis Serbia dan Albania. Konflik tersebut mengakibatkan banyak korban meninggal, cacat fisik, maupun yang hilang.

Tetapi untuk menyatakan kemerdekaan tidak mudah karena dibutuhkan perjuangan, keberanian, dan kerja keras agar kemerdekaan dapat terwujud. Demikian halnya dengan apa yang dilakukan Kosovo dengan Para pejuang kemerdekaan Kosovo, yang dikenal sebagai Kosovo Liberation Army (KLA) yaitu Tentara Pembebasan Kosovo yang berjuang untuk melepaskan diri dari Serbia setelah mengalami berbagai konflik yang berkepanjangan. Serbia pernah melakukan penekanan, pengekangan, dan penindasan atas rakyat Kosovo, yang dilakukan oleh pemerintah komunis di masa lalu berlangsung selama puluhan tahun. Hal itu dilakukan Serbia sebagai usaha untuk penyatuan Serbia Raya setelah pecahnya negara-negara yang tergabung dalam Republik Federal Sosialis Yugoslavia.

Walaupun telah dilakukan berbagai dialog untuk penyelesaian masalah Serbia-Kosovo tetapi kemerdekaan tidak dapat terlaksana. Melihat kondisi ini maka diperlukan keberanian dan langkah nyata untuk mewujudkan kemerdekaan. Maka pada tanggal 17 Februari 2008 Kosovo mendeklarasikan kemerdekaan. Deklarasi yang dibacakan oleh Perdana Menteri Hashim Thaci berbunyi, Kosovo akan menjadi negara demokratis yang menghargai hak-hak semua etnis.⁴ Dengan harapan baru untuk kehidupan yang lebih baik dan melepaskan diri dari tekanan sebagaimana yang tertuang dalam piagam PBB dan Hukum Internasional. Apalagi negara ini juga secara

⁴ www.bbc.co.uk/go/wsy/pub/rss/1.0/-/indonesian/. Diunduh pada tanggal 20 Agustus 2008.

de facto telah merdeka sejak 10 Juni 1999 karena telah lepas dari kekuasaan Serbia dan berada di bawah pengawasan PBB dengan pemerintahan sementara.

Bagi pemerintah Serbia, tuntutan kemerdekaan Kosovo merupakan gerakan pemisahan diri sehingga harus dicegah menggunakan berbagai cara. Hal tersebut juga dilakukan oleh pemerintahan Kosovo dengan berusaha untuk melepaskan diri dari tekanan dibawah rezim otoriter Serbia. Akibatnya, selama hampir dua dekade pemerintah Serbia disibukkan oleh kegiatan menumpas gerakan pemisahan diri Kosovo. Serbia juga banyak mendapat kecaman dari negara-negara didunia akibat kekejaman kepada penduduknya sendiri yang berbeda ideologi seperti dengan Bosnia dan Kosovo, khususnya etnis Albania yang merupakan penduduk mayoritas di Kosovo, dimana hal tersebut sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip Barat tentang Hak Asasi Manusia (HAM).

Ketika warga Kosovo merayakan kemenangan dan merasakan kebahagiaan, hal tersebut tidak dirasakan oleh masyarakat Serbia terutama kaum minoritas yang tinggal di Kosovo sebanyak 120.000 orang di antara dua juta orang Albania menolak deklarasi kemerdekaan.⁵ Dan masyarakat Serbia yang berada di Kosovo, mereka melakukan aksi demonstransi yang berbuntut pada aksi brutal juga mendatangi sejumlah kedutaan besar yang mendukung kemerdekaan Kosovo dan menjadi sasaran amuk massa. Demikian halnya dengan pemerintahan Serbia menolak keras kemerdekaan tersebut dan mengancam Kosovo dengan sanksi diplomatik dan

⁵ <http://www.suarakarya-online.com/news.html?id=195055>, diunduh pada tanggal 23 Agustus 2008.

ekonomi, namun tidak dengan kekerasan. Serbia akan berusaha untuk menghalangi Kosovo menjadi anggota PBB.

Semula Kosovo adalah wilayah bagian Federasi Yugoslavia yang punya otonomi luas, baik secara teritorial maupun kultural. Punya parlemen dan kepala eksekutif sendiri dalam menjalankan pemerintahan, walaupun pejabat yang diangkat untuk mengurus pemerintahan selalu orang Serbia. Begitu juga dalam hal mengelola keuangan, kebudayaan, pendidikan, informasi, kesejahteraan, serta bahasa sendiri.

Saat ini, Kosovo menjadi negara keenam yang terbentuk dari bekas federasi Yugoslavia menyusul Slovenia, Kroasia, Masedonia, Bosnia, dan Montenegro serta menjadi negara merdeka ke-193 yang merupakan negara termuda di dunia. Dengan adanya kemerdekaan Kosovo menimbulkan reaksi yang beragam dari masyarakat internasional, sejumlah negara menyatakan dukungan atas kemerdekaan Kosovo dan sejumlah negara menyatakan menolak karena berbagai alasan, bahkan ada yang belum menentukan sikap dan menunggu keputusan dari Dewan Keamanan PBB. Meningat kemerdekaan Kosovo tidak mendapat dukungan dari Dewan Keamanan PBB.

Sejumlah negara yang mendukung beranggapan bahwa kemerdekaan merupakan kedaulatan suatu negara, dan negara-negara yang menolak kemerdekaan Kosovo pada umumnya khawatir hal tersebut akan semakin memicu bagi wilayah lain yang sedang berpikir untuk merdeka.

C. Pokok Permasalahan

Dari latar belakang masalah tersebut diatas penulis ingin mengangkat permasalahan yaitu *mengapa peran PBB lemah dalam proses kemerdekaan Kosovo?*

D. Kerangka Dasar Teori

1. Teori Peran

Menurut pendapat K.J. Holsti,⁶ konsep peran yang berhubungan dengan organisasi internasional, bahwa peranan merefleksikan kecenderungan pokok serta sikap terhadap lingkungan eksternal, terhadap variabel sistem, geografi dan ekonomi. Dalam teori peran perilaku individu harus dipahami dan dimaknai dalam konteks sosial. Peran (*role*) adalah perilaku yang diharapkan akan dilakukan oleh seseorang yang menduduki posisi. Baik posisi berpengaruh dalam organisasi maupun dalam sikap negara. Setiap orang yang menduduki posisi itu diharapkan berperilaku sesuai dengan sifat posisi itu.

Teori peranan menegaskan bahwa ”perilaku politikadalah perilaku dalam menjalankan peranan politik”. Teori ini berasumsi bahwa perilaku politik adalah akibat dari tuntutan atau harapan terhadap peran yang kebetulan dipegang oleh seorang aktor politik. Dalam teori ini juga menjelaskan bahwa aktor politik umumnya berusaha menyesuaikan perilakunya dengan norma yang berlaku dalam peran yang

⁶ Holsti, K.J, *Politik Internasional Suatu Kerangka Analisa*, Bina Cipta, Bandung, 1987.hal 159.

dijalankannya. Jadi kegiatan politik individu selalu ditentukan oleh konteks sosialnya.⁷

Menurut John Wahlke, teori peranan memiliki dua kemampuan yang berguna bagi analisis politik. Pertama, ia menunjukkan bahwa aktor politik pada umumnya berusaha menyesuaikan perilakunya dengan norma perilaku yang berlaku dalam peran yang dijalankannya. Jadi kegiatan politik individu selalu ditentukan oleh konteks sosialnya. Kerangka berpikir teori peranan memandang individu sebagai seorang yang tergantung pada dan bereaksi terhadap perilaku orang lain. Kedua, teori peranan mempunyai kemampuan mendeskripsikan institusi secara behavioral.⁸

PBB dan negara-negara anggota sebagai pelaku pembuat kebijakan sangat berperan penting dalam mengatasi permasalahan antara Serbia dan Kosovo. Peran PBB tersebut yaitu sebagai pembuat keputusan berupa Undang-undang dan aturan lainnya. Selain itu sebagai suatu organisasi internasional PBB berperan dalam memfasilitasi perundingan-perundingan untuk menyelesaikan konflik yang terjadi antara Serbia dan Kosovo. Keterlibatan Dewan Keamanan PBB baru terjadi dalam masalah Kosovo dengan diadopsinya Resolusi 1244 (1999) pada 10 Juni 1999, yang menempatkan provinsi Kosovo di bawah administrasi PBB dengan tugas membentuk pemerintahan sementara untuk Kosovo, agar rakyat Kosovo mendapat otonomi luas dan pemerintahan sendiri.

⁷ Mas'oed, Mohtar, Studi Hubungan Internasional, PAU-SS UGM, Yogyakarta, 1989. Hal 44.

⁸ *Ibid*, hal. 45.

PBB juga berperan dalam menentukan status final Kosovo, apakah masih menjadi bagian dari Serbia atau menjadi sebuah negara yang berdiri sendiri. Karena PBB sangat berhubungan dengan hak menentukan nasib sendiri dan masalah keamanan internasional sebagaimana yang tertuang didalam piagam PBB.

2. Teori Organisasi Internasional

Menurut Jack C Plano,⁹ yang dimaksud dengan organisasi internasional merupakan suatu ikatan formal melampaui batas wilayah nasional yang menetapkan untuk membentuk mesin kelembagaan agar memudahkan kerjasama diantara mereka dalam bidang keamanan, ekonomi, sosial, serta bidang lainnya. Dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa organisasi internasional sangat berperan dalam pembangunan suatu negara. Bahkan memiliki peran yang penting yaitu sebagai alat untuk mencapai kepentingan nasional suatu negara. Organisasi Internasional mempunyai kekuatan dalam mendukung kepentingan berbagai negara untuk menyalurkan kepentingan mereka yang melewati batas-batas wilayah nasional. Sehingga negara-negara dapat berfungsi lebih baik tidak hanya dimata masyarakat internasional tetapi juga masyarakatnya sendiri.

Organisasi internasional berfungsi sebagai media komunikasi internasional yang diharapkan dapat memberikan pedoman untuk bertindak pada situasi tertentu di

⁹ Plano, Jack C, Robert E. Riggs dan Helena S. Robin, *Kamus Analisa Politik*, Rajawali, Jakarta, 1986. hal 271.

lingkungan internasional. Dapat dikatakan peran organisasi internasional merupakan reaksi dari situasi internasional yang muncul.

Sebuah organisasi internasional memiliki kelebihan dan kekurangan, terjadi karena keanggotaan terdiri dari berbagai negara yang memiliki kepentingan nasional yang berbeda-beda. Kelebihan organisasi internasional yaitu sebagai lembaga yang digunakan untuk mencapai kepentingan suatu negara. Selain itu, dapat menyerap berbagai aspirasi negara-negara anggotanya, yang sangat dibutuhkan dalam menyelesaikan berbagai permasalahan di dunia. William D. Coplin¹⁰ mengemukakan bahwa organisasi internasional selain sebagai tempat interaksi negara-negara anggotanya dalam menjalankan politik luar negeri, juga bisa dilihat sebagai institusi yang mampu menghasilkan kebijakan (*Policy Maker*) dengan aktor yang mempengaruhi pembuatan kebijakan (*Policy Influencer*).

Yang dimaksud *Policy Maker* dalam organisasi internasional adalah sekretaris Jenderal atau pemimpin badan administrasi (sekretariat). Sedangkan *Policy Influencer* adalah negara anggota, yang bisa dianggap sebagai *partisan influencer* yang sangat berpengaruh karena memiliki *voting power* (kekuatan suara) untuk menentukan kebijakan mana yang bisa dituruti oleh para pengambil keputusan. Pengaruh dari berdirinya organisasi internasional dalam kehidupan suatu negara baik pada saat krisis maupun saat membangun adalah untuk meningkatkan kesejahteraan bangsa, karena organisasi internasional bertujuan untuk mengembangkan politik dan

¹⁰ Coplin, William D. *Introduction of International Politics*. Terjemahan: Drs. Marsedes Marbun, Sinar Baru, Bandung, 1992.

keamanan nasional disatu pihak serta pembangunan ekonomi dan kesejahteraan sosial dipihak lain.

Organisasi internasional juga memiliki kelemahan, yaitu pada otonomi dan fungsi organisasi internasional relatif terbatas. Karena organisasi internasional dibentuk secara sukarela oleh negara-negara anggotanya, sehingga untuk mencapai tujuan organisasi berdasarkan kerelaan anggotanya. Begitu juga halnya dengan kedaulatan masih dipegang negara, organisasi internasional tidak dapat memaksa dan menghukum negara-negara anggota yang melanggar hukum. Maka, negara anggota merupakan aktor yang paling penting dalam proses pengambilan kebijakan di organisasi internasional.

Lemahnya otonomi dalam organisasi internasional dapat dilihat pada penyusunan anggaran, misalnya Majelis Umum PBB dapat membagi secara adil pengeluaran organisasi kepada anggotanya, namun apabila terdapat negara yang tidak melakukan kewajibannya, sanksi yang diberikan adalah kehilangan suara dalam Majelis dan akan berlaku jika telah menunggak lebih dari dua tahun. Kelemahan ini terjadi karena organisasi internasional kurang memiliki sumber keuangan karena tidak bisa untuk menarik pajak. Keterbatasan otoritas organisasi internasional juga tampak pada keterbatasan dana yang tersedia untuk operasional. *Budget* organisasi internasional relatif kecil dibandingkan dengan negara-negara anggotanya.¹¹

¹¹ Sugito, *Diktat Organisasi dan Administrasi Internasional*, Yogyakarta, 2004. Hal 34-35.

Mengacu pada klasifikasi yang dibuat oleh Couloumbis dan Wolfe¹² bahwa organisasi antar pemerintah (IGO) dapat diklasifikasikan menjadi empat kategori besar yang berdasarkan pada keanggotaan dan maksud/tujuannya. *Pertama*, Organisasi internasional antar pemerintah dengan maksud dan tujuan yang umum. Misalnya, Liga Bangsa-Bangsa dan PBB. Kedua organisasi internasional ini ruang lingkungannya global dan menjalankan berbagai macam fungsi, seperti dalam bidang kerjasama ekonomi, keamanan, perlindungan atas hak asasi manusia, pengembangan kebudayaan dan sebagainya. *Kedua*, organisasi internasional antar pemerintah dengan keanggotaan global dan tujuan yang spesifik atau khusus. Organisasi jenis ini dikenal pula dengan organisasi fungsional sebab menjalankan fungsi yang bersifat khusus. Contohnya badan-badan khusus dari Perserikatan Bangsa-Bangsa, misalnya Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) dan Organisasi Kesehatan se Dunia (WHO). *Ketiga*, Organisasi antar pemerintah dengan keanggotaan yang regional atau kawasan dan dengan maksud dan tujuan umum. Organisasi internasional semacam ini merupakan organisasi internasional yang bercorak kawasan, biasanya bergerak dalam bidang yang luas meliputi keamanan, politik, sosial, ekonomi, dan lain-lain. Contohnya Masyarakat Ekonomi Eropa. *Keempat*, Organisasi antar pemerintah dengan keanggotaan regional dengan maksud dan tujuan khusus atau terbatas. Organisasi internasional semacam ini bergerak dalam satu bidang khusus misalnya ada yang bergerak dalam bidang militer dan pertahanan, ekonomi, sosial dan lain-

¹² Theodore A. Couloumbis, James H. Wolfe, *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional Keadilan dan Power*, Alih Bahasa Drs. Marbun, Penerbit Putra A Bardin, Bandung, 1999. Hal 254.

lain. Contohnya, Asosiasi Perdagangan Bebas Amerika Latin (Latin America Free Trade Association), Council for Mutual Economic Assistance (COMECON), North Atlantic Treaty Organization (NATO), Pakta Warsawa dan lain-lain.

Menurut Karen Mingts ada beberapa fungsi yang bisa dijalankan oleh organisasi internasional baik itu ditingkat internasional, negara, maupun individu.¹³ Pada tingkat internasional, Organisasi Internasional berperan dalam: *Pertama*, memberikan kontribusi untuk terciptanya suasana kerjasama diantara negara/aktor. Dengan adanya organisasi internasional diharapkan negara dapat saling bersosialisasi secara reguler sehingga dapat tercipta suatu kondisi yang dianjurkan oleh kaum fungsionalist. *Kedua*, menyediakan informasi dan pengawasan. Fungsi ini sejalan dengan pemikiran *Collective Goods*, dimana Organisasi Internasional menyediakan informasi, hasil-hasil survei, dan pengawasan. *Ketiga*, memberikan bantuan terhadap konflik yang terjadi. *Keempat*, Mengkoordinir aktivitas internasional mengenai permasalahan bersama. Dan yang *kelima* yaitu menyediakan arena *bargaining* bagi negara-negara dalam menyelesaikan suatu masalah.

Melihat pada klasifikasi organisasi internasional diatas, PBB merupakan sebuah organisasi internasional antar pemerintah dengan maksud dan tujuan yang umum. Badan ini dibentuk sebagai wadah bagi negara-negara anggotanya untuk melakukan hubungan antar negara. Peran dari berdirinya organisasi internasional bagi suatu negara baik pada saat krisis maupun saat membangun adalah untuk

¹³ Mingts, Karen, *Essentials of International Relations*, WW Norton & Company, New York, 1999. Hal 241-245.

meningkatkan kesejahteraan bangsa, karena organisasi internasional untuk mengembangkan politik dan keamanan nasional disatu pihak serta pembangunan ekonomi dan kesejahteraan sosial dipihak lain.

Selain itu fungsi organisasi ini dalam bidang keamanan yaitu menciftakan perdamaian antar negara anggota, seperti menghindari suatu konflik atau perang. Dan mendukung kerjasama antar anggota negara, baik negara dengan negara, pemerintah dengan pemerintah, pemerintah dengan organisasi non pemerintah yang bergerak dalam bidang sosial atau keamanan.¹⁴

Keberadaan PBB di Kosovo dimulai sejak tahun 1999 yakni setelah terjadinya pemboman terhadap tentara Serbia oleh Kosovo Forces (KFOR), yaitu pasukan multinasional yang dibentuk setelah berakhirnya perang Kosovo di bawah pimpinan NATO. Pasukan Kosovo atau KFOR mengemban tugas dari Dewan Keamanan PBB untuk menjaga keamanan bagi kembalinya para pengungsi. Konflik antar etnis yang terjadi antara Serbia dan Albania menelan puluhan ribu korban. Semenjak itu pemerintahan Kosovo dibawah pengawasan PBB agar rakyat Kosovo mendapat otonomi luas dan menentukan pemerintahannya sendiri di dalam negara Republik Federal Yugoslavia. Kemudian pembicaraan status final Kosovo baru dimulai pada tahun 2006 melalui negosiasi dibawah pimpinan utusan khusus sekjen PBB. Dengan dilakukannya perundingan-perundingan untuk menemukan penyelesaian masalah antara Serbia dan Kosovo.

¹⁴ Suherman, Ade Maman, *Organisasi Internasional dan Integrasi Ekonomi Regional dalam Perspektif Hukum dan Globalisasi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003. Hal. 85.

E. Hipotesa

Dari latar belakang serta teori yang digunakan maka penulis mencoba menemukan jawaban sementara bahwa *peran PBB lemah dalam usaha pencapaian kemerdekaan Kosovo*, yaitu karena:

1. Masalah internal : PBB tidak dapat mengatasi perbedaan suara antara anggota tetap Dewan Keamanan PBB. Amerika Serikat mendukung kemerdekaan Kosovo, sedangkan Rusia mendukung Serbia agar Kosovo tetap menjadi bagian dari negara Serbia.
2. Masalah eksternal : PBB tidak bisa menjembatani antara Serbia dan Kosovo. Hal tersebut terjadi karena masing-masing negara tetap pada pendiriannya yaitu keinginan Serbia mempertahankan Kosovo dari wilayahnya, dan sebaliknya keinginan Kosovo untuk melepaskan diri dari Serbia.

F. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penulisan ialah agar penulis dapat mengetahui upaya apa saja yang dilakukan PBB dalam usaha pencapaian kemerdekaan Kosovo. Mengingat PBB merupakan sebuah organisasi internasional yang memiliki andil besar dalam menciptakan dan menjaga perdamaian dunia. Selain itu, untuk mengetahui sejauh mana kendala yang dihadapi PBB dalam mengatasi permasalahan Kosovo baik kendala internal maupun eksternal. Penulisan ini juga dimaksudkan untuk memenuhi

syarat memperoleh gelar sarjana S1 pada Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

G. Jangkauan Penelitian

Untuk menghindari terjadinya perluasan pembahasan dalam penulisan ini. Maka penulis memberi batasan agar penulis tetap fokus pada perhatian sehingga tidak melebar terlalu jauh dan membantu memudahkan penulis dalam pengumpulan data.

Sebagai pembatasan dalam penelitian ini adalah peran Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam usaha pencapaian kemerdekaan Kosovo pada tahun 2006-2008. Yaitu sejak dimulainya usulan yang diajukan oleh pimpinan khusus Sekjen PBB Martti Ahtisaari sampai pendeklarasian kemerdekaan Kosovo

H. Metode Penelitian

Penulisan ini menggunakan studi pustaka, dengan menggunakan metode kualitatif sehingga data yang didapatkan berasal dari literatur-literatur, situs-situs internet, artikel-artikel, jurnal, surat kabar dan sumber lain yang berhubungan dengan permasalahan.

I. Sistematika Penulisan

Penulisan ini terbagi atas 5 bab, yaitu meliputi:

BAB I Pendahuluan

- I.A. Alasan pemilihan judul
- I.B. Latar Belakang Masalah
- I.C. Pokok Permasalahan
- I.D. Kerangka Teori
- I.E. Hipotesa
- I.F. Tujuan Penulisan
- I.G. Jangkauan Penelitian
- I.H. Metode Penelitian
- I.I. Sistematika Penulisan

BAB II Gambaran Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa

- II.A. Alasan Pembentukan PBB
- II.B. Sejarah PBB
- II.C. Tujuan PBB
- II.D. Tindakan PBB Dalam Menjaga Perdamaian Dunia
- II.E. Organ-Organ PBB

BAB III Sejarah dan Perkembangan Konflik Kosovo

- III.A. Sejarah Kosovo

III.B. Perkembangan Konflik di Kosovo

III.C. Intervensi NATO Terhadap Serbia

III.D. Dampak Konflik Kosovo

BAB IV Sebab-sebab Peran Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Lemah dalam

Usaha Pencapaian Kemerdekaan Kosovo

IV.A. Sebab-sebab dukungan PBB atas Usaha Kemerdekaan Kosovo

IV.B. Dinamika Perbedaan Suara di DK PBB

IV.C. Reaksi Serbia Pasca Kemerdekaan Kosovo

IV.D. Reaksi Masyarakat Dunia atas Kemerdekaan Kosovo

BAB V Kesimpulan